

**PENGARUH KETERBATASAN SISTEM INFORMASI, KOMITMEN  
MANAJEMEN, DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh)



Oleh :

SILVIA  
02136/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode Maret 2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH KETERBATASAN SISTEM INFORMASI, KOMITMEN  
MANAJEMEN, DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh)**

**SILVIA  
02136/2008**

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode  
Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing**

**Padang,     Maret 2013**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak  
19710302 199802 2 001**

**Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak  
19771123 200312 1 003**

**PENGARUH KETERBATASAN SISTEM INFORMASI, KOMITMEN  
MANAJEMEN, DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh)**

**Silvia**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [silvia\\_ociel@yahoo.co.id](mailto:silvia_ociel@yahoo.co.id)

***Abstract***

*Demands of people who want better public services and accountability contained in the instruction of President Number 7 of 1999 concerning the Government Performance Accountability and Decision of the State Administration Institute (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 on Guidelines for Preparation of Reporting Performance Accountability The government aimed to create good governance. Demands of society and the regulations require local governments to report their performance. Both of these are external factors that influence the perception of local government officials on performance accountability. This study aimed to examine: 1) Information Systems Limited Effect on Performance Accountability Government. 2) Effect of Management Commitment to Accountability of Government Performance. 3) Effect of Decision-Making Authority of the Government Performance Accountability SKPD Payakumbuh. This type of research study are classified as causative. The population in this study is SKPD in Payakumbuh. Sampling technique with a total sampling method. The data analysis technique used is multiple regression. Respondents in this study was the head of department, chief / head of section in SKPD Payakumbuh by the number of respondents 135 people from 29 SKPD. Research conclusion shows: 1) Information Systems Limited has no significant negative impact on the Government Performance Accountability. 2) Management Commitment significant positive impact on the Government Performance Accountability 3) Authority decisions have significant positive impact on performance accountability of government agencies. Suggestions in this study were: 1) For the government should further improve the information systems used in government circles, especially to obtain the necessary performance measurement data are valid, reliable, and timely impact on the optimal information presentation and reporting the performance of each program and activities of government agencies. 2) For further research may add other variables are strong influence on the performance of local government.*

**Keyword: Limitations of Information Systems, Management Commitment, Decision Authority, Government Performance Accountability**

**Abstrak**

Tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang lebih baik serta pertanggungjawaban yang tercantum dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditujukan untuk menciptakan good governance. Tuntutan masyarakat dan peraturan yang berlaku mengharuskan pemerintah daerah melaporkan kerjanya. Kedua hal tersebut merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi pegawai instansi pemerintah daerah tentang akuntabilitas kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Pengaruh Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Payakumbuh. Teknik pengambilan sampel dengan metode *total sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Responden pada penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bidang/kepala bagian di SKPD Kota Payakumbuh dengan jumlah responden 135 orang dari 29 SKPD. Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Keterbatasan Sistem Informasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3) Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan sistem informasi yang digunakan dalam lingkungan pemerintah terutama untuk memperoleh data pengukuran kinerja yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu yang berdampak pada optimalnya penyajian dan pelaporan informasi kinerja dari setiap program dan kegiatan instansi pemerintah. 2) Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Kata kunci: Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Otoritas Pengambilan Keputusan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Salah satu aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2003). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Nurkhamid (2008) mengartikan akuntabilitas kinerja sebagai wujud kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan kegagalan pencapaian berbagai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diperbarui dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2003) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja diantaranya: keterbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran kinerja, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan, dan budaya organisasi.

Keterbatasan sistem informasi adalah keterbatasan kemampuan sistem informasi yang ada untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu. Penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk akuntabilitas dan mendukung pembuatan keputusan kemungkinan menjadi terbatas karena keterbatasan sistem informasi akan menghalangi para manajer memperoleh data yang tepat waktu dan reliabel (Nurkhamid, 2008).

Guna menciptakan organisasi dengan kinerja yang tinggi diperlukan komitmen manajemen yang tinggi dari pimpinan dan stafnya untuk mencapai hasil yang diinginkan GAO (2001) dalam Nurkhamid (2008). Menurut Nadirsyah (2008) komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Keberadaan komitmen manajemen

yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.

Otoritas pengambilan keputusan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja (Artley, 2001 dalam Nurkhamid, 2008). Otoritas pengambilan keputusan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi (Cavalluzzo dan Ittner, 2003). Personil yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan akan memberikan dukungan yang lebih tinggi terhadap implementasi yang dilakukan organisasi.

Akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2011 dinilai masih rendah yakni baru mencapai 37,33 persen dari target 80 persen pada 2014 nanti. Dari hasil evaluasi secara nasional, akuntabilitas instansi pemerintah yang baik hanya 37,33 persen sedangkan perkembangan di kabupaten kota masih lambat yakni 1,16 persen di 2009 menjadi 4,26 persen di 2010 dan 12,78 persen di 2011 (Sindonews.com). Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan hanya ada dua Pemerintah Provinsi (Pemprov) yakni Jawa Tengah dan Kalimantan Timur dan satu Pemerintah Kota (Pemkot) yaitu Sukabumi yang mendapatkan predikat B. Sisanya yaitu 17 pemprov dan 21 kabupaten kota mendapat predikat Cukup Baik (CC), termasuk Sumatera Barat.

Menurut Solikin (2005) dalam Nurkhamid (2008) kondisi di Indonesia semakin parah karena adanya bias dalam pelaporan kinerja (LAKIP) yang dibuat instansi pemerintah. Bias tersebut muncul karena pemerintah banyak mengaitkan kinerjanya yang baik secara berlebihan karena usaha sendiri, sedangkan

kinerjanya tidak baik dikaitkan dengan faktor eksternal.

Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja instansi pemerintah masih banyak yang harus dibenahi terutama dalam hal pemberian informasi kinerja, adanya keterbatasan sistem informasi akan menghambat para manajer publik untuk memperoleh data pengukuran kinerja yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu yang berdampak pada kurang optimalnya penyajian dan pelaporan informasi kinerja dari setiap program dan kegiatan instansi pemerintah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pemerintah diperlukan juga komitmen manajemen dan otoritas pengambilan keputusan agar program kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dapat berjalan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada sejauhmana pengaruh beberapa faktor yang diduga berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor tersebut diantaranya keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan. Oleh karena itu penulis ingin menuangkan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**. (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh)

## **Tinjauan Teoritis**

### **1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

*The Governmental Accounting Standards Board's Concept Statement No 2* dalam Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik merupakan kewajiban manajer sektor publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang

diembannya, di lain pihak masyarakat dan para wakil rakyat yang terpilih proaktif menilai kinerja dan mengambil tindakan berdasarkan kinerja yang ada. Tindakan yang dapat dilakukan masyarakat dan para wakil rakyat misalnya dengan mengalokasikan sumber daya, memberikan pengakuan atau imbalan, atau menetapkan sanksi berdasarkan hasil yang dicapai oleh manajer.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003).

## 1.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dalam akuntabilitas dan *good governance* (2001), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## 1.3 Format dan isi LAKIP

Menurut LAN dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (2003), format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas :

### 1. Ikhtisar eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya

#### a. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

#### b. Rencana strategis

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

##### 1) Rencana strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dari visi-misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

##### 2) Rencana kinerja

Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

#### c. Akuntabilitas kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

#### d. Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## 2. Lampiran-lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, metode, dan aspek lain dari data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan tetapi dimuat dalam lampiran.

### 1.4 Tujuan dan Manfaat LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik.

LAKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara

baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel).

## 2. Keterbatasan Sistem Informasi

### 2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Dalam sistem informasi diperlukan klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi (Laudon, 2007).

Sistem informasi menurut Ratih (2011) merupakan sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai atau suatu sistem yang mengubah atau memproses data menjadi informasi, sehingga merupakan model dasar sistem informasi. Norman (2010) mengungkapkan bahwa kualitas sistem informasi merupakan faktor kunci dalam menentukan pengimplementasian sistem pengukuran kinerja.

### 2.2 Elemen Sistem Informasi

Menurut Billy dan Mahamudu (2011), sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang merupakan komponen fisik. Elemen-elemen sistem informasi:

#### 1) Orang

Orang atau personil yang dimaksud yaitu operator komputer, analisis programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi/EDP.

#### 2) Prosedur

Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini dapat disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan

- masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer.
- 3) Perangkat Keras  
Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran), peralatan penyiapan data, dan terminal masukan/keluaran.
  - 4) Perangkat Lunak  
Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama:
    - a) Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer.
    - b) Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan.
    - c) Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara khusus dibuat untuk setiap aplikasi.
  - 5) Basis Data  
File yang berisi program data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain diatas kertas, mikro film, dan lain sebagainya.
  - 6) Jaringan Komputer  
Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data.
  - 7) Komunikasi Data  
Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data

### 2.3 Keterbatasan Sistem Informasi

Menurut KBBI (2002), keterbatasan adalah keadaan terbatas atau telah dibatasi. Keterbatasan sistem informasi merupakan keadaan dimana sistem informasi memberikan keterbatasan untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh pengguna informasi (Norman, 2010).

Teknologi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu sistem informasi. Organisasi yang tidak memiliki teknologi yang tepat dan memadai biasanya akan mengalami kesulitan dalam mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi produk atau jasa yang sudah dihasilkan. Organisasi dengan kualitas sistem informasi yang lebih baik akan dapat mengimplementasikan sistem pengukuran secara lebih mudah dibandingkan dengan organisasi dengan sistem informasi yang kurang baik (Poole et al dan Krumwiede dalam Nurkhamid, 2008).

Indikator keterbatasan sistem informasi menurut Nurkhamid (2008): kesulitan memperoleh data yang valid atau reliabel, kesulitan memperoleh data secara tepat waktu, biaya pengumpulan data yang tinggi, dan ketidakmampuan teknologi informasi yang ada untuk memberikan data yang diperlukan.

### 3. Komitmen Manajemen

Norman mempersepsikan komitmen manajemen sama dengan komitmen organisasi. Allen dan Meyer dalam Norman (2010) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi.

Menurut Sapeni dalam Fardyan (2010) komitmen dapat diartikan kecenderungan dalam diri seseorang untuk merasa aktif dalam suatu kegiatan, harus sanggup menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri dan melaksanakan



kegiatannya tersebut dengan kesungguhan hati dan rasa tanggungjawab.

Menurut Mukjizat (2000) manajemen adalah pejabat pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga orang bekerjasama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen harus mencapai tujuan dengan bekerja melalui orang lain, pimpinan tidak akan dapat melaksanakan seluruh strategi organisasi dengan bekerja sendiri.

Menurut Nadirsyah (2008) komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai.

Organisasi dengan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen. Dengan demikian keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.

Indikator komitmen manajemen menurut Nurkhamid (2008) manajemen memiliki komitmen untuk mengalokasikan sumberdaya (meliputi: waktu, orang, uang), menugaskan staf dan divisi/departemen dalam organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu program, mengumpulkan data yang relevan dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi serta menggunakan *benchmark* untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

#### **4. Otoritas Pengambilan Keputusan**

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya (KBBI, 2002). Menurut Rivai (2008) pengambilan keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan masalah. Pengambilan keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi, informasi yang disaring dari berbagai sumber disaring, diproses dan ditafsirkan melalui persepsi-persepsi individu.

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2003) otoritas pengambilan keputusan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi. Pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada para bawahannya merupakan elemen penting untuk terciptanya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan adanya pendelegasian otoritas pengambilan keputusan maka dapat membantu manajemen untuk dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, menumbuhkembangkan kreatifitas dan usaha dalam melakukan suatu perubahan. Selain itu juga dapat meningkatkan akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik. Setiap bawahan yang diberi otoritas untuk mengambil keputusan dan bawahan tersebut harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dengan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada bawahan dalam instansi pemerintah dapat membantu organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **5. Penelitian yang Relevan**

Nurkhamid (2008) melakukan penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Pemprov DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi terbukti berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja, otoritas pengambilan keputusan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja, keterbatasan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja.

Norman (2010) melakukan penelitian tentang implementasi sistem pengukuran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Ratih (2011) melakukan penelitian tentang Persepsi terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran, Akuntabilitas, dan Penggunaan Informasi Kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Deva (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Kerangka Konseptual.**

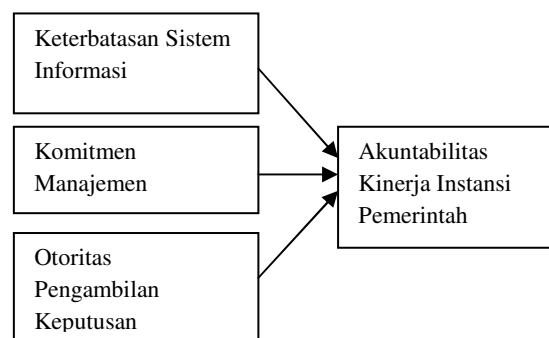
Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan,

mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen dengan Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, dan Otoritas Pengambilan Keputusan sebagai variabel independen.

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pertanggungjawaban pencapaian suatu kegiatan/ program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Adanya keterbatasan sistem informasi akan menghalangi akuntabilitas kinerja karena dalam pembuatan keputusan akan terbatas jika adanya keterbatasan sistem informasi yang akan menghalangi manajer memperoleh data tepat waktu.

Komitmen manajemen merupakan faktor yang diperlukan dalam akuntabilitas kinerja, karena komitmen manajemen sebagai suatu ikatan psikologis karyawan yang akan memberikan dampak secara langsung terhadap tujuan organisasi. Otoritas pengambilan keputusan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Personil yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan akan memberikan dukungan yang lebih tinggi terhadap implementasi yang dilakukan organisasi.

Untuk menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:



**Kerangka Konseptual**

### **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Keterbatasan sistem informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H2: Komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H3: Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2005). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan keterbatasan sistem informasi, komitmen organisasi, dan otoritas pengambilan keputusan sebagai variabel independen dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependennya.

### **Populasi, Sampel, dan Responden**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah (pegawai negeri sipil) pada pemerintah Kota Payakumbuh yang tersebar di 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini menggunakan metode *total sampling* karena populasi kurang dari 100 subjek.

Responden pada penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bidang/kepala bagian di SKPD Kota Payakumbuh dengan jumlah responden 135 orang dari 29 SKPD. Alasan pemilihan responden dikarenakan responden merupakan

pegawai yang terlibat dalam pembuatan dan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden yang diantar langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut dilakukan.

### **Variabel Penelitian**

#### **1. Variabel Terikat (Y)**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah.

#### **2. Variabel bebas (X)**

. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

- Keterbatasan Sistem Informasi ( $X_1$ )
- Komitmen Manajemen ( $X_2$ )
- Otoritas Pengambilan Keputusan ( $X_3$ )

### **Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian**

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

## Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten.

## Hasil Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan pada 30 mahasiswa akuntansi FE UNP yang telah mengambil Akuntansi Sektor Publik.. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dapat dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $n=30$  adalah 0,3061.

Sedangkan untuk melihat reliabilitas dari masing-masing item kuesioner digunakan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka dapat dikatakan reliable. Dari hasil pengolahan data didapat nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 sehingga semua item pernyataan variabel keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%.

### 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas di antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* > 0,10. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel atau menambah variabel bebasnya.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini, apabila hasil sig > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

## Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Pengolahan data yang telah didapat dari responden. Data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah

semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden. (b) menghitung nilai jawaban yang dilakukan dengan cara: menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan, Menghitung rata-rata skor total item, Menghitung nilai rerata jawaban responden, Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, lalu nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik.
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

### Metode Analisis

#### a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

#### b. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari 1 variabel bebas. Data diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 15.0. Persamaan model regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
 A = Konstanta

- $b_{1,2}$  = Koefisien regresi dari variabel independen  
 $X_1$  = Keterbatasan Sistem Informasi  
 $X_2$  = Komitmen Manajemen  
 $X_3$  = Otoritas Pengambilan Keputusan  
 e = Standar error

#### c. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$ , maka model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

#### d. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari  $\alpha = 5\%$ , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan koefisien (beta) negatif, maka  $H_1$  ditolak.
- b. Jika signifikan  $\alpha < 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan koefisien regresi (beta) positif, maka  $H_2$  dan  $H_3$  diterima.

### Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan kegagalan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik.

## 2. Keterbatasan Sistem Akuntansi

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Keterbatasan sistem informasi adalah keterbatasan kemampuan sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu.

## 3. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen merupakan suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai.

## 4. Otoritas Pengambilan Keputusan

Otoritas pengambilan keputusan adalah suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otoritas atau hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi.

Untuk instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,387, untuk instrumen keterbatasan sistem informasi nilai terkecil 0,711, untuk instrumen komitmen manajemen nilai terkecil 0,414 dan untuk instrumen otoritas pengambilan keputusan nilai terkecil 0,585.

## 2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 0,838, untuk keterbatasan sistem informasi 0,910, untuk komitmen manajemen 0,838 dan untuk otoritas pengambilan keputusan 0,803. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari tabel terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,831 dengan signifikan 0,495. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N = 107$ , adalah 0,1882. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$  semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$  adalah valid.

penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas  $> 0,05$ .

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan  $VIF < 10$  maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Hasil yang diperoleh dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi  $> \alpha 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

## Teknik Analisis Data

### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil penelitian besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,628. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen dan otoritas

pengambilan keputusan adalah sebesar 62,80%, sedangkan 37,20% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### 2. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari tiga variabel bebas yaitu keterbatasan sistem informasi ( $X_1$ ), komitmen manajemen ( $X_2$ ), dan otoritas pengambilan keputusan ( $X_3$ ), dan satu variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ( $Y$ ). Berdasarkan tabel analisis regresi dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = 11,04 - 0,57 X_1 + 0,574 X_2 + 0,1384 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

$a$  = Konstanta

$X_1$  = Keterbatasan Sistem Informasi

$X_2$  = Komitmen Manajemen

$X_3$  = Otoritas Pengambilan Keputusan

$E$  = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 11,043 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan adalah nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar konstanta 11,043.

b. Koefisien keterbatasan sistem informasi sebesar 0,57 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan keterbatasan sistem informasi satu satuan akan mengakibatkan penurunan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebesar 0,57 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- c. Koefisien komitmen manajemen sebesar 0,574 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan komitmen manajemen, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,574 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien otoritas pengambilan keputusan sebesar 1,386 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan otoritas pengambilan keputusan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 1,386 dengan asumsi variabel lain konstan.

### 3. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen dan otoritas pengambilan keputusan secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 4. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan  $\alpha 0,05$  atau dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . dapat dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

### 1. Keterbatasan Sistem Informasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha 0,05$ . Nilai t tabel pada  $\alpha 0,05$  adalah 1,6597. Untuk variabel keterbatasan sistem informasi ( $X_1$ ) nilai t hitung adalah 0,853 dan nilai sig adalah 0,396. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,853 < 1,6597$  atau nilai signifikansi  $0,396 > \alpha 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_1$  bernilai negatif yaitu -0,051. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa keterbatasan sistem informasi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini **ditolak**.

### 2. Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk variabel komitmen manajemen ( $X_2$ ) nilai t hitung adalah 5,342 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,342 > 1,6597$  atau nilai signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_2$  bernilai positif yaitu 0,435. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa komitmen manajemen ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini **diterima**.

### 3. Otoritas Pengambilan Keputusan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk variabel otoritas pengambilan keputusan ( $X_3$ ) nilai t hitung adalah 9,202



dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $9,202 > 1,6597$  atau nilai signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_3$  bernilai positif yaitu 0,568. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa otoritas pengambilan keputusan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini **diterima**.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Kravcuk dan Schank (1996) dalam Nurkhamid (2008) yang menunjukkan bahwa instansi pemerintah sering menghadapi masalah yang serius dalam pengukuran kinerja karena adanya berbagai masalah dalam sistem informasi yang digunakan seperti perbedaan definisi data, teknologi, kemudahan akses, dan jumlah data yang didapatkan. Dengan adanya keterbatasan sistem informasi akan menjadi penghalang bagi pemimpin dalam instansi pemerintah untuk mendapatkan data dengan tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga kemampuan pemimpin dalam menggunakan sistem pengukuran kinerja pun menjadi terbatas. Hal ini akan menjadi penghambat bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem pengukuran, akuntabilitas dan penggunaan informasi kinerja guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Tidak signifikannya pengaruh negatif keterbatasan sistem informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa aparat Pemda Payakumbuh tidak mempermasalahkan keterbatasan data dan

sistem informasi dalam pelaporan kinerja. Hal ini bisa disebabkan karena terlalu besarnya pengaruh berbagai ketentuan atau peraturan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah di Indonesia menyusun Renstra dan Lakip. Kondisi ini menyebabkan penyusunan Renstra dan Lakip tidak selalu didukung dengan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas Renstra dan Lakip belum menjadi perhatian utama, namun penyusunan Renstra dan Lakip baru sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan/peraturan saja.

Berdasarkan data distribusi frekuensi variabel keterbatasan sistem informasi dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden sebesar 77,85%, TCR berada dalam kategori baik. Nilai TCR terendah yaitu 75,32% yaitu adanya biaya yang tidak sebanding dengan informasi yang saya peroleh untuk mengumpulkan data pengukuran kinerja yang diperlukan.. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya SKPD yang terdapat di kota Payakumbuh belum begitu memperhatikan keterbatasan sistem informasi yang ada pada setiap program dan kegiatan instansi pemerintah untuk penyajian dan pelaporan kinerja. Dengan kata lain, kualitas Renstra dan Lakip belum menjadi perhatian utama, namun penyusunan Renstra dan Lakip baru sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan/peraturan saja. Oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan sistem informasi yang digunakan dalam lingkungan pemerintah terutama untuk memperoleh data pengukuran kinerja yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu yang akan berdampak pada optimalnya penyajian dan pelaporan informasi kinerja dari setiap program dan kegiatan instansi pemerintah.

### **2. Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya semakin tinggi komitmen

manajemen, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurkhamid (2008) yaitu organisasi dengan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen. Dengan demikian keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.

Akuntabilitas kinerja akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan komitmen manajemen yang tinggi dari organisasi, karena organisasi dengan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurkhamid (2008), Norman (2010), dan Ratih (2011) tentang komitmen manajemen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Mereka menemukan bahwa keberadaan komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Komitmen manajemen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik.

Berdasarkan data distribusi frekuensi variable komitmen manajemen dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden sebesar 87,18%, TCR berada dalam kategori baik. Dari hasil penelitian ini diketahui masing-masing SKPD Kota Payakumbuh memiliki komitmen manajemen yang tinggi. Ini terlihat dari pimpinan selalu menunjukkan komitmen

yang kuat untuk mencapai suatu program. Komitmen manajemen ini sangat penting dalam mencapai akuntabilitas kinerja karena semakin baik komitmen manajemen yang dimiliki oleh suatu organisasi maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

### **3. Pengaruh Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pengambilan keputusan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Payakumbuh. Pengaruh antara otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa semakin baik otoritas pengambilan keputusan maka akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Mwitia (2000) dalam Nurkhamid (2008) bahwa otoritas pengambilan keputusan juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Terpusatnya otoritas pengambilan keputusan juga akan mengurangi tingkat akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik dan akan menyebabkan timbulnya keputusan tentang kinerja dan sumber daya yang tidak diinginkan dan mengarah pada penurunan kualitas pelayanan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Norman (2010) dan Ratih (2011) yang menyatakan bahwa otoritas pengambilan keputusan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada para bawahannya merupakan elemen penting untuk terciptanya peningkatan kinerja organisasi. Karena dengan otoritas yang lebih besar dan pada tingkatan yang lebih tinggi dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tingkatan yang lebih rendah.

Dengan demikian, para manajer yang memiliki otoritas dalam suatu organisasi dapat menerapkan kebijakan yang dibuatnya seperti penerapan sistem pengukuran kinerja agar tercapai akuntabilitas kinerja sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Personil perlu diberi otoritas untuk membuat ukuran atau target kinerja sendiri dan untuk mencapai target itu sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi. Karena untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi, partisipasi dari semua pihak yang berada di dalam organisasi tersebut akan sangat membantu untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik.

Dilihat dari distribusi frekuensi, otoritas pengambilan keputusan telah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan nilai rerata TCR sebesar 86,97%. Nilai TCR terendah 85,98% dengan saran dan kritik dari masyarakat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Otoritas pengambilan keputusan yang selama ini sudah dimiliki mampu mendorong penggunaan informasi kinerja untuk pertanggungjawaban kinerja dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sistem Informasi tidak terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap

Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Otoritas Pengambilan Keputusan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

### **B. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan belum diterapkan secara maksimal, sehingga mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 62,80%. Sehingga masih terdapat 37,20% pengaruh variabel lain terhadap kuat terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan sistem informasi yang digunakan dalam lingkungan pemerintah terutama untuk memperoleh data pengukuran kinerja yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu yang berdampak pada optimalnya penyajian dan pelaporan informasi kinerja dari setiap program dan kegiatan instansi pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan komitmen manajemen dan otoritas pengambilan keputusan agar program kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dapat berjalan efektif
2. Penelitian ini masih terbatas pada keterbatasan sistem informasi, komitmen manajemen, dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja, untuk penelitian

selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas seperti budaya organisasi dan kesulitan menentukan ukuran kinerja.

3. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ratih Widya. 2011. *Persepsi Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran, Akuntabilitas, dan Penggunaan Informasi Kinerja di Instansi Pemerintah*. Skripsi (tidak diterbitkan). Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga
- Cavalluzzo, Ken S, dan Christopher D. Ittner. 2003. *Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government*. ([www.SSRN.com](http://www.SSRN.com)). Hal 1-54 [18/02/2012].
- Griffin, R.W. 2004. *Manajemen Jilid 2*. Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Cetakan 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laudon, C. Kenneth. 2007. *Sistem Informasi Manajemen Buku 1*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN. Jakarta
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mahsun, Sulistiyowati, dan Andre, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- Muntoro, Ronny Kusuma, 2007. *Sistem Informasi untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Melalui (<http://www.google.co.id>). Diakses [18/02/2012]
- Norman, F. 2010. *Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu*. Jurnal SNA XIII. Purwokerto.
- Nurkhamid, M. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Volume 3 Nomor 1. Jurnal Akuntansi Pemerintah

- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Rivai, Veithal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi Ed 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi daerah*. Bandung: Mandar maju.
- Sindo, 2012. *Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masih Rendah*. Melalui (<http://www.google.co.id>). Diakses tanggal [21/02/2012]
- Sopiah, 2008. *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta: PT Andi
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers

Hasil Penelitian

## Reliability Akuntabilitas Kinerja (Y)

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	11

## Reliability Keterbatasan Sistem Informasi (X1)

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,910	4

## Reliability Komitmen Manajemen (X2)

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	7

## Reliability Otoritas Pengambilan Keputusan (X3)

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,807	3

## Regression Uji Determinasi

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 <sup>a</sup>	,638	,628	2,42658

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

## NPar Tests Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,39199384
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,051
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,831
Asymp. Sig. (2-tailed)		,495

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Regression Uji Multikolinearitas

### Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,043	2,537		4,353	,000		
	X1	-,057	,067	-,051	-,853	,396	,964	1,038
	X2	,574	,082	,435	6,958	,000	,898	1,114
	X3	1,386	,151	,568	9,202	,000	,921	1,086

a. Dependent Variable: Y

## Regression Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,579	1,580		2,265	,026
	X1	,015	,042	,036	,361	,719
	X2	-,089	,051	-,177	-1,725	,088
	X3	,026	,094	,028	,277	,782

a. Dependent Variable: AbsUt